



## Tinjauan Kritis *Statements* Para Tokoh Tentang Kasus Tanah Golo Mori dalam Pemberitaan Media Massa Daring (*Critical Review of Personages Statements About the Golo Mori Land Dispute in the Online Mass Media Reportation*)

Antonius Nesi<sup>a,1</sup>, Tati Sri Uswati<sup>a,2\*</sup>, dan B. Wahyudi Joko Santoso<sup>a,3</sup>

<sup>a1</sup> Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus, Ruteng, Indonesia

<sup>a2</sup> IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

<sup>a3</sup> Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>1</sup>antonynesi81@gmail.com; <sup>2</sup>tatisriuswati@gmail.com; <sup>3</sup>wahyudifr@mail.unnes.ac.id

\*Corresponding Author

Article info

A B S T R A C T

Article history:

Received: 07-11-2021

Revised : 01-12-2021

Accepted: 27-02-2022

*This study aims to critically review the statements of personages related to the land dispute Golo Mori in West Manggarai, Nusa Tenggara Timur, at the online mass media consists of Kompas.com, cnnindonesia.com, Poskupang.com, and Voxntt.com. In collecting data the researchers used the listening method, reading and note-taking techniques. In analyzing the data, the researcher used the content analysis method which was applied through the stages of identification, classification, and meaning of the data. The results showed that the statements of the characters were always repeated; use passive sentences and negative sentences that refer to certain meanings. Each media is unique in its reporting. Two national online media focused more on the authorities, while the other two regional media focused on victims and advocates. Land dispute resolution is actually an ancestral heritage that should be considered as a cultural norm in conflict resolution.*

Keywords:

*critically review*

*cultural context*

*online mass media*

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis *statements* para tokoh terkait sengketa tanah Golo Mori di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada media massa daring *Kompas.com*, *cnnindonesia.com*, *Poskupang.com*, dan *Voxntt.com*. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode simak, teknik baca dan catat. Pada analisis data peneliti menggunakan metode analisis isi yang diterapkan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan pemaknaan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan para tokoh selalu diulang; menggunakan kalimat pasif dan kalimat negatif yang merujuk pada makna tertentu. Masing-masing media memiliki keunikan di dalam pemberitaannya. Dua media *online* nasional lebih menyoroti pihak aparat, sedangkan dua media regional lainnya menyoroti korban dan advokat. Penyelesaian sengketa tanah sesungguhnya merupakan warisan leluhur yang patut dipertimbangkan sebagai norma budaya di dalam penyelesaian konflik.

Copyright © 2022 Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

All rights reserved.

### PENDAHULUAN

Suatu bentuk variasi berita yang sering ditemukan dalam pemberitaan media massa daring (dalam jaringan) adalah *statements* dari para tokoh, baik tokoh yang terlibat langsung sebagai subjek maupun tokoh lain yang dikonfirmasi sebagai



narasumber berita. Dari perspektif jurnalisme, setiap pernyataan dari tokoh atau narasumber diformulasikan melalui kutipan, baik langsung maupun tidak di dalam laporan berita. Dalam arti lain, sesungguhnya media massa, termasuk media massa daring, dipandang sebagai agen konstruksi, yakni institusi yang berperan penting dalam memformulasikan atau mengonstruksi suatu realitas menjadi informasi kepada publik (Indah & Mardikatoro, 2017; Kartikasari, 2020; Pratiwi, 2018). Dalam artikel ini *statements* dibatasi sebagai pernyataan-pernyataan dari tokoh tertentu yang dikutip di dalam media massa daring. *Statements* merupakan ragam pengetahuan dari figur dalam ekspresi verbal, termasuk tanda-tanda yang diproduksi dan direproduksi untuk memberikan gambaran, menegaskan, atau menyatakan informasi (Graham, 2012; Al Chazim, Mulyaningsih, & Uswati, 2019). *Statements* tidak lain merupakan deretan pernyataan dari tokoh tertentu dalam melihat atau menggambarkan suatu topik dari sudut pandangnya.

Sehubungan dengan itu, artikel ini beratensi meninjau secara kritis pernyataan-pernyataan dari para tokoh yang diberitakan di dalam pemberitaan media massa daring berkenaan dengan sengketa tanah di Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sengketa tanah itu bermula pada Februari 2021 dan selalu dilaporkan dalam bentuk berita pada media massa daring. Seturut pemberitaan media massa daring, sengketa tanah tersebut tidak hanya memantik seteru di tingkat lokal maupun regional, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Hal itu disebabkan Desa Golo Mori yang terletak di pinggiran Labuan Bajo, bagian timur Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT, merupakan daerah yang bakal menjadi tempat destinasi wisata super premium.

Lepas dari berbagai isu politik yang ada, artikel ini hendak menganalisis beberapa pernyataan dari para tokoh yang diberitakan dalam media massa daring, baik media massa daring tingkat regional (*Poskupang.com* dan *Voxntt.com*) maupun tingkat nasional (*Kompas.com* dan *cnnindonesia.com*). Pemberitaan mengenai sengketa tanah Golo Mori ini patut ditelisik dari perspektif kritis. Media massa mempunyai beragam cara untuk menggunakan bahasa dan menciptakan makna, yaitu mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, memperluas makna dari istilah-istilah yang ada. Bahkan, sebagaimana dikemukakan De Fleur (Santoso, 2018), cara lain untuk menciptakan wacana ialah pembangun wacana dapat mengganti makna lama sebuah kata atau istilah dengan makna baru. Analisis wacana kritis merupakan suatu telaah yang bertujuan untuk menjelaskan makna, motif, dan ideologi yang dibingkai dalam konteks sosial, budaya, situasi, dan kognitif tertentu (Wodak & Meyer, 2009). Dengan kata lain, analisis wacana kritis beratensi untuk mengoreksi pandangan kaum konstruktivis yang kurang memberi perhatian terhadap proses produksi dan reproduksi makna, baik yang terjadi secara historis maupun institusional (Maricar, 2018).

Kajian ini menggunakan model analisis kritis Norman Fairclough yang terdiri atas tiga tahap analisis, yakni (1) deskripsi, (2) interpretasi, dan (3) eksplanasi (Fairclough, 1989). Analisis deskripsi adalah tahap awal yang berkaitan dengan sifat-sifat formal dari teks yang meliputi kosakata, tata bahasa, dan struktur tekstual. Sementara itu, tahap interpretasi berkaitan dengan proses produksi dan penafsiran terhadap teks. Interpretasi dilakukan dengan mencari hubungan antarteks, yang meliputi empat hal, yakni: ujaran, makna ujaran, koherensi lokal, dan keutuhan wacana. Interpretasi juga dikaitkan dengan konteks yang meliputi dua hal, yakni konteks situasi dan konteks intertekstualitas. Konteks situasi berkaitan dengan cara melihat pengaruh sosial di sekitar teks, sedangkan



konteks intertekstualitas berkenaan dengan upaya eksplorasi untuk membandingkan teks yang dianalisis dengan teks lain yang sudah ada. Fairclough (1989) mencatat bahwa tahap interpretasi menyangkut empat domain, yakni (1) permukaan ujaran, (2) maksud ujaran, (3) koherensi lokal, dan (4) struktur teks atau *'poin'*. Domain permukaan ujaran merupakan penafsiran teks tingkat pertama yang berkaitan dengan proses penafsir mengubah rangkaian suara atau tanda yang tertera pada *paper* dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat.

Domain maksud ujaran merupakan penafsiran tingkat kedua, yakni pemberian makna pada bagian-bagian penyusun teks. Domain koherensi lokal merupakan interpretasi tingkat ketiga, yakni membangun hubungan makna antara ucapan, dan menghasilkan interpretasi yang koheren dari pasangan dan urutan. Tahap ini bukanlah masalah hubungan koherensi global yang mengikat bagian-bagian dari keseluruhan teks, tetapi hubungan koherensi dalam bagian tertentu dari sebuah teks. Sementara itu, domain struktur teks dan poin pada level empat adalah masalah bagaimana keseluruhan teks saling terkait, disebut koherensi global. Tingkat ini melibatkan pencocokan teks dengan salah satu skema representasi dari pola karakteristik organisasi yang terkait dengan berbagai jenis wacana (Fauzan, 2016; Mayasari et al., 2013).

Ekplanasi dapat dipahami sebagai hasil analisis tahap akhir yang meliputi hubungan antara teks dan konteks. Dalam hal itu, ekplanasi dibuat untuk menelusuri hasil penafsiran dengan merujuk aspek sosial dan kultural. Berkaitan dengan itu, pada tahap ini perlu dijelaskan mengenai kondisi sosial dan kultural, lembaga atau institusi yang turut terlibat di dalam praktik wacana, serta dimensi sosial yang di dalamnya termuat motif politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dalam ekplanasi penafsir dapat menghubungkan deskripsi dan interpretasi untuk menganalisis praktik sosiokultural berupa hubungan antara praktik wacana dan konteks sosial. Hal tersebut dapat dikaitkan antara situasi khusus dengan proses produksi teks, institusi atau lembaga yang terlibat, serta sistem-sistem lain di sekitar terbentuknya wacana (Susylowati, 2019). Analisis pada tahap ini akan berhasil mengungkap suatu evaluasi yang komprehensif tentang wacana yang dianalisis.

Ada beberapa peneliti yang telah mengkaji pemberitaan terkait pernyataan para tokoh dalam sengketa atau kasus tertentu, baik bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain menggunakan model analisis kritis Fairclough. Montejo & Adriano (2018) meneliti perangkat diskursif yang digunakan dalam *headline* berita media massa daring untuk mengungkap ideologi media. Hasil penelitian itu menyibak bahwa terdapat sepuluh perangkat diskursif yang digunakan dalam berita utama untuk menarik perhatian pembaca. Lebih lanjut ditemukan bahwa dalam kasus tertentu penulis berita tidak hanya objektif atau netral, tetapi kadang juga subjektif, bias, bahkan menyesatkan. Hal itu terutama dipengaruhi oleh ideologi media, yakni keberpihakan media terhadap peristiwa atau objek serta orientasi kepentingan di balik pemberitaan.

Zhang (2014) melakukan analisis kritis terhadap laporan berita media Amerika tentang perang Irak. Hasil telaah itu menunjukkan bahwa penggunaan bahasa oleh reporter media tidak pernah lepas bias. Reporter menggunakan berbagai alat linguistik untuk memproduksi gambaran yang sangat berbeda, baik untuk pihak Amerika maupun Irak. Media Amerika melaporkan perang di Irak untuk kepentingan bangsa mereka sendiri. Analisis kritis laporan berita ini menyarankan bahwa analisis kritis sangat penting untuk membantu pembaca



berita mencapai pemahaman yang lebih baik, komprehensif, dan kritis tentang isi pemberitaan, terutama pemberitaan tentang perang atau kekerasan.

Pada ranah politik, Assidik & Santoso (2016) mengkaji citra publik presiden dalam pemberitaan media massa. Pemetaan hasil penelitian itu memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan media dalam mengonstruksi berita terkait pembentukan citra publik presiden, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari sisi pernyataan-pernyataan presiden yang dipersepsi positif ataupun negatif (kualitas). Selanjutnya, Ellyawati (2016) mengkaji perlakuan istimewa terhadap terpidana suap tokoh Arthalyta Suryani. Di dalamnya berhasil diidentifikasi ragam ideologi media yang dapat memengaruhi konstruksi pemberitaan jurnalis. Beberapa media menyajikan pernyataan-pernyataan yang memperlakukan tersangka secara istimewa, sedangkan media lainnya bersifat hati-hati netral.

Deskripsi di atas diperkuat pula oleh hasil penelitian Khan et al., (2019) yang berfokus pada *statements* Donald Trump selama masa kampanye pencalonannya sebagai Presiden AS. Penelitian tersebut memeriksa prasangka-prasangka dari Trump terkait dengan isu keagamaan menggunakan analisis model Van Dijk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam mengemas kampanyenya, Trump terbukti menggunakan berbagai teknik diskursif untuk merepresentasikan Islam secara negatif. Untuk melegitimasi argumennya, dia menggunakan beberapa strategi retorika, termasuk viktimisasi, pengandaian, otoritas, polarisasi, dan populisme. Di balik itu, Trump gagal menyajikan referensi terkait dengan kontribusi umat Islam di Amerika. Tampak pula bahwa pada tahap eksplanasi, media *mainstream* terbelah menjadi dua kubu, ada yang konsisten dan netral tetapi ada juga yang inskonsisten.

Beberapa hasil penelitian sebagaimana dikemukakan telah berkontribusi di dalam menelusuri lebih jauh tentang perangkat diskursif, membandingkan isi berita antarmedia, serta memberikan gambaran tentang pembentukan persepsi terhadap figur tertentu di dalam berita. Meskipun demikian, beberapa penelitian tersebut belum sampai pada tahap melakukan analisis kritis terhadap *statements* para tokoh samapi pada tahap eksplanasi untuk menghubungkan *statements* dengan konteks sosial dan budaya terbentuknya teks. Padahal, sesungguhnya *statements* tokoh di dalam berita mesti tidak lepas dari konteks sosiokultural, dan itu justru menjadi unsur yang sangat penting, mengingat selain paparan faktual terdapat juga informasi kunci, baik yang dikemukakan oleh subjek pemberitaan maupun narasumber, baik sebagai pakar, tokoh, ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis *statements* para tokoh dalam pemberitaan media massa daring tentang masalah tanah di Golo Mori berdasarkan model analisis Norman Fairclough. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya terkait analisis wacana kritis serta dapat dimanfaatkan baik oleh para praktisi (jurnalis) ketika mengemas berita maupun oleh para guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks.

## METODE

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini ialah berita dalam media massa daring, yakni *Kompas.com* dan *cnnindonesia.com* sebagai wakil media massa nasional, dan *Poskupang.com* dan *Voxntt.com* sebagai wakil media regional NTT. Dari masing-masing media tersebut diambil satu berita yang memberitakan ‘sengketa tanah Golo Mori’ di



Manggarai Barat, NTT. Pengumpulan data ditempuh melalui penelusuran sumber data secara daring selama September sampai dengan Oktober 2021. Sumber data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Berita yang Dianalisis**

No.	Judul berita	Media	Edisi
1.	“21 Orang Ditangkap Terkait Sengketa Tanah di Desa Golo Mori Manggarai Barat”	<i>Kompas.com</i>	6/9/2021
2.	“21 Warga Ditangkap Aparat Buntut Sengketa Tanah di Golo Mori”	<i>cnnindonesia.com</i>	6/9/2021),
3.	“Tangisan Ibu-ibu Golo Mori Manggarai Barat, Bersimpuh Minta Bebaskan Suami Dari Sel Tahanan”	<i>Poskupang.com</i>	30/9/2021
4.	“Terungkap! Kapolres Mabar Diduga Terlibat dalam Sengketa Jual Beli Tanah di Golo Mori”	<i>Voxntt.com</i>	25/9/2021

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak yang diterapkan melalui teknik baca dan catat (Sudaryanto, 2016). Prosedur pengumpulan data meliputi tahap, yakni peneliti (1) menelusuri berita dari sumber data, (2) membaca dengan saksama tiap berita yang telah ditetapkan sebagai sumber data, (3) menandai bagian-bagian *statements* dari tokoh tertentu yang dikutip secara langsung di dalam berita, (4) memasukkan tiap *statements* ke dalam tabel analisis data. Validasi data menggunakan triangulasi sumber berita atau penulis berita, yakni data-data yang telah dikumpulkan disampaikan kepada dua wartawan untuk diperiksa, yakni wartawan *Poskupang.com* dan wartawan *Voxntt.com*. Selain itu, juga dilakukan triangulasi teori dan konfirmatoris, yakni dengan membandingkan hasil analisis dengan teori-teori analisis wacana kritis, penelitian-penelitian terkait, serta melakukan diskusi bersama pakar dan teman sejawat dalam Diskusi Kelompok Terpimpin (DKT).

Adapun analisis data penelitian menggunakan metode analisis isi, yakni peneliti menganalisis makna, maksud, dan tujuan dari setiap *statements*. Dari data-data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan langkah-langkah meliputi (1) identifikasi data, yaitu menandai unsur-unsur pernyataan yang relevan untuk dimaknai, (2) klasifikasi data, yakni membagi bagian-bagian data ke dalam unit-unit berdasarkan tahapan analisis model Fairclough, meliputi deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi, dan (3) simpulan, yakni menarik inferensi dari hasil temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi data ditemukan 12 pernyataan dari para tokoh yang dikutip wartawan dalam empat media massa daring. Adapun rinciannya ialah empat pernyataan dari *Kompas.com* dan delapan pernyataan lainnya dari *cnnindonesia.com*, *Poskupang.com*, dan *Voxntt.com* dengan masing-masing sebanyak dua kutipan. Tokoh-tokoh di dalam pemberitaan yang pernyataannya dikutip adalah Kabidhumas Polda NTT, Kapolres Manggarai Barat, Wakapolres Manggarai Barat, seorang ibu rumah tangga, dan Koordinator JPIC-SVD. Data-data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.



**Tabel 2. Data Penelitian**

No.	Pernyataan	Tokoh	Status atau jabatan
1.	"Upaya pengamanan tersebut untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang bisa memicu konflik lebih luas" ( <i>Kompas.com</i> 6/9/2021)	Kombes Pol Rishian Krisna	Kabid Humas Polda NTT
2.	"Tiga warga Golo Mori dan 18 warga dari Kabupaten Manggarai, kemudian ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka" ( <i>Kompas.com</i> 6/9/2021)	Kombes Pol Rishian Krisna	Kabid Humas Polda NTT
3.	"Kasus seperti ini seringkali berujung bentrok dengan warga lokal. Kami tidak ingin bentrokan bisa memicu konflik lebih luas," kata Krisna. ( <i>Kompas.com</i> 6/9/2021)	Kombes Pol Rishian Krisna	Kabid Humas Polda NTT
4.	"Dari diskusi tersebut, Kapolres Manggarai Barat mendapat keterangan, warga Golo Mori sudah melakukan persiapan untuk mengusir secara paksa 21 orang yang menjadi lawannya," kata Krisna. ( <i>Kompas.com</i> 6/9/2021)	Kombes Pol Rishian Krisna	Kabid Humas Polda NTT
5.	"Ya pada saat itu kita tangkap 21 warga itu untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang bisa saja memicu konflik lebih luas. Apalagi yang ditangkap itu, dua kubu yang mayoritas berbeda agama," katanya, di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Senin. ( <i>cnindonesia.com</i> 6/9/2021)	AKBP Bambang Wibowo	Kapolres Manggarai Barat, NTT
6.	"Karena itu saya tidak ingin kejadian itu (konflik) terulang kembali di daerah wisata ini," ujar dia. ( <i>cnindonesia.com</i> 6/9/2021)	AKBP Bambang Wibowo	Kapolres Manggarai Barat, NTT
7.	"Sampai berapa lama suami dan anak-anak kami harus 'menanggung tuduhan hukum' yang tidak pernah mereka buat. Sudah tiga bulan mereka mendekam di bilik jeruji. Apa salah mereka bapak Kapolres? Mereka hanya petani jelata yang hendak mengais rupiah sebagai 'buruh harian' di tanah Mori. Mereka bukan pembunuh, bukan masa bayaran, bukan teroris, bukan pengacau berbau SARA. Mereka datang ke tanah Mori karena hendak mengisi perut istri dan anak-anak. Mereka memeras keringat dan harus banting tulang agar asap dapur tetap mengepul," katanya. ( <i>Poskupang.com</i> 29/9/21)	Melania Mamu.	Warga sipil, seorang ibu rumah tangga yang suaminya ikut ditangkap polisi
8.	"Bapak Kapolres yang kami cintai! Sejak suami kami 'masuk tahanan', hidup kami sangat menderita. Kami harus menanggung beban batin sebab dicap sebagai istri teroris dan pembunuh. Banyak orang menjauh dan tidak mau bergaul dengan kami. Belum lagi, kantong ekonomi kami semakin menipis. Tidak ada lagi figur yang bisa menafkai kami. Hidup kami sangat morat-marit akibat 'jeratan hukum' yang dipaksakan kepada suami-suami kami. Padahal, suami-suami kami tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang penegak hukum tuduhkan," jelasnya. ( <i>Poskupang.com</i> 29/9/21)	Melania Mamu.	Warga sipil, seorang ibu rumah tangga yang suaminya ikut ditangkap polisi
9.	"Apa yang menjadi aspirasi dari ibu-ibu, dari warga yang demo, sudah kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan dalam hal ini bapak Kapolres," katanya. ( <i>Poskupang.com</i> 29/9/21)	Kompol Eliana Papote	Wakapolres Manggarai Barat, NTT
10.	"Kami masih menunggu petunjuk dari jaksa," katanya.	Kompol Eliana Papote	Wakapolres Manggarai Barat, NTT
11.	"Dugaan itu diperkuat dengan pengakuan dari penjual tanah di Rase Koe bernama Yasin bahwa ia menjual tanah tersebut ke salah satu anggota polisi di Polres Mabar". ( <i>Voxntt.com</i> 25/9/2021)	Simon Tukan, SVD	Koordinator JPIC-SVD, Ruteng, Flores



No.	Pernyataan	Tokoh	Status atau jabatan
12.	“Saya jelaskan bahwa kemarin tidak terjadi bentrok namun yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat adalah mengamankan 21 orang yang membawa senjata tajam dan menduduki lahan yang sedang bersengketa.” ( <i>Voxntt.com</i> 25/9/2021)	AKBP Bambang Wibowo	Kapolres Manggarai Barat, NTT

## Deskripsi

Mencermati dua berita yang disajikan media massa nasional terlihat bahwa para tokoh dalam hal ini, yaitu Kabid Humas Polda NTT, Kapolres Manggarai Barat, dan Wakil Kapolres Manggarai Barat, selalu mengeluarkan *statements* dengan mengulang beberapa kosakata, yakni *keamanan*, *pengamanan*, *mengamankan*, *ditangkap*, *konflik*, *bentrok*, dan *bentrokkan*. Kata-kata tersebut di dalam isi pemberitaan mengalami variasi bentuk, dari kata dasar *aman* (adjektiva) berubah menjadi *keamanan* atau *pengamanan* (bentuk nomina abstrak), dan dari kata kerja dasar *tangkap* menjadi kata kerja pasif *ditangkap*. Kata *keamanan* dan *pengamanan* dipilih sebagai diksi untuk merepresentasikan tugas pokok polisi sebagai aparatur negara yang memang memiliki tugas menjaga keamanan masyarakat sipil. Sementara itu, penggunaan kata *ditangkap*, *konflik*, *bentrok*, dan *bentrokkan*, dalam konteks kedua berita pada media massa nasional itu, memiliki relasi makna antonimi sekaligus berkonotasi negatif dengan kata *aman*, *keamanan*, dan *pengamanan*. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa terjadi nominalisasi, dari kata sifat menjadi kata benda. Perubahan ini untuk menyembunyikan ‘agen’ (Fairclough, 1995; Van Dijk, 2008). Pilihan kata seperti ini tentu menjadi hal penting mengingat suatu peristiwa dapat dinyatakan melalui bahasa dan bahasa sekaligus bisa memanipulasi peristiwa (Hura et al., 2020; Lailiyah et al., 2021).

Di sisi lain, dalam pemberitaan *Poskupang.com* dan *Voxntt.com*, dua media massa daring tingkat regional, dikutip pernyataan dari tokoh lain selain aparat, yakni seorang masyarakat sipil dan seorang rohaniwan. Warga sipil tersebut adalah representasi dari ibu-ibu yang datang berdemonstrasi di Kantor Polres Manggarai Barat karena merasa suami mereka bukanlah penjahat, pembunuh, atau teroris yang perlu ditangkap. Mereka datang ke Golo Mori semata untuk bekerja sebagai buruh harian yang memang harus membawa peralatan kerja seperti pacul dan parang. Bila dicermati sebagaimana terlihat di dalam pernyataannya, Ibu tersebut selalu mengulangi beberapa unsur (kata dan frasa), yakni, *hukum*, *hukuman*, *dihukum*, *hukum yang dituduhkan*, dan *penegak hukum*.

Kata-kata tersebut tentu berkait erat dengan peristiwa penahanan suami ibu tersebut. Menurutnya, suaminya itu tidak melanggar hukum sebagaimana “diduga” atau “disangkakan” aparat kepadanya. Deskripsi ini disebut *rewording* (kata-kata yang diulang) atau *overwording* (kata-kata yang digunakan secara berlebihan), biasanya mencerminkan ideologi atau cerminan pergumulan idealisme dari pemberi pernyataan, atau pemberi pernyataan membuat penegasan tentang topik atau hal yang hendak disoroti di dalam membangun wacananya (Mohammadi & Javadi, 2017; Mustika & Mardikantoro, 2018). Pada sisi lain, pilihan kata-kata (diksi) dapat membantu menciptakan hubungan sosial dan cenderung memiliki nilai relasional secara bersamaan dengan nilai-nilai lain atau ideologi tertentu di balik penggunaannya (Fairclough, 1989). Sementara itu, Koordinator JPIC-SVD, oleh media daring *Voxntt.com* hanya dikutip satu pernyataan di dalam seluruh isi berita. Dari pernyataannya itu tampak ada indikasi



konspirasi, yakni dugaan pembelian tanah oleh seorang anggota polisi. Dalam pernyataannya pemberi pernyataan menggunakan kata *dugaan*. Dari sisi argumentasi dalam konstruksi wacana, diksi ini mengandung makna indikasi, sehingga pemberi pernyataan perlu membuktikannya dengan sederetan fakta (Abbas, 2021; Smith-Khan, 2019).

Terkait peristiwa pengamanan ke-21 warga, media daring *Kompas.com* menggunakan formulasi pasif sehingga menghilangkan subjek (pelaku), sedangkan *cnnindonesia.com* menggunakan bentuk aktif dan menyebut secara tegas ‘aparatus’ sebagai pihak yang menangkap ke-21 warga. Sementara itu, berkaitan dengan peristiwa demonstrasi para ibu, *Poskupas.com* dan *Voxntt.com* menggunakan bentuk aktif. Ada hal menarik pada judul *Voxntt.com*, yakni terdapat diksi ‘Terungkap!’, dan Kapolres Mabar disebut sebagai subjek pada judul. Fitur-fitur gramatikal sebagaimana tampak pada setiap judul sesungguhnya menunjukkan bukan hanya soal ketegasan, tetapi juga para pelaku yang diberitakan menjadi ‘subjek’ yang disoroti media bersangkutan (Fairclough, 1989).

Dari empat pernyataan Kabidhumas Polri, terdapat dua pernyataan yang patut dimaknai, yakni pernyataan pada data 1 dan data 2. Pada data 1, subjek kalimat berupa frasa *upaya pengamanan tersebut*, sementara predikat tidak ditampakan, yang sesungguhnya adalah kata *bermaksud* atau *bertujuan* – dapat ditafsirkan dari penggunaan kata *untuk* sebagai kata keterangan tujuan – merupakan bentuk aktif intransitif. Sebagai kalimat aktif intransitif, kalimat tersebut tidak memerlukan objek, tetapi keterangan, dan dalam konteks kalimat tersebut, kata *untuk* menunjuk pada keterangan tujuan, yakni *mencegah jatuhnya korban jiwa yang bisa memicu konflik lebih luas*. Dengan demikian, posisi subjek pada pernyataannya itu merujuk pada suatu proses, daya, atau usaha.

Pernyataan Kabidhumas Polda pada data 1 berbeda dalam hal struktur sintaksis dengan pernyataannya yang kedua (data 2). Pernyataannya sebagaimana tampak pada data 2 justru diformulasikan dalam bentuk pasif yang ditunjukkan dengan penggunaan kata *ditangkap* dan *ditetapkan*. Penggunaan bentuk pasif pada kedua pernyataan ini dapat mengaburkan pelaku (siapa yang menangkap dan menetapkan), sebaliknya justru menjadikan menampilkan subjek sebagai korban (Mulae & Mahdi, 2014). Dua pernyataan lainnya berbentuk kalimat aktif, sehingga tidak menghilangkan fungsi subjek. Perbedaan signifikan pada data 1 dan data 2 dengan data 3 dan 4, ialah bawa data 1 dan 2 merupakan pernyataan yang berkaitan erat dengan pihak kepolisian (harusnya: ditangkap dan ditetapkan oleh polisi), sedangkan data 3 dan 4 berkaitan dengan warga (warga dijadikan sebagai subjek).

Pernyataan Kapolres Manggarai Barat sebagaimana tampak pada data 5 dan data 6 pun menarik perhatian. Pada data 5, Kapolres secara eksplisit menggunakan kata ganti persona pertama jamak sebagai pengisi fungsi subjek. Penggunaan kata *kita* sebagai subjek pada pernyataannya merujuk pada pihak kepolisian sebagai pelaku. Pernyataan tersebut berbeda dengan pernyataannya pada data 12 yang justru menggunakan persona pertama tunggal sebagai subjek. Penggunaan persona pertama tunggal itu tampak merupakan bentuk pengakuan diri sebagai pejabat, yakni Kapolres Manggarai Barat, bukan semata-mata mengatasnamakan dirinya sebagai individu. Dalam hal seorang tokoh memberikan keterangan, wacana kritis akan melihat dua hal, yakni pribadi dan lembaga (agen). Adakalanya, institusi dimanfaatkan seseorang untuk menyembunyikan maksud tertentu, atau untuk



menghindari ancaman, sehingga lembaga atau institusi yang memiliki jangkauan dan pengaruh yang lebih luas menjadi pilihan untuk menunjukkan *power* (Shah & Mubarak, 2018).

Sementara itu, pada data 6, ia menggunakan formulasi kalimat negatif sebagai alasan pembenaran terhadap peristiwa 21 warga yang mereka tangkap. Hal itu tampak jelas melalui penggunaan kata *tidak* sebagaimana pernyataan, “*Karena itu saya tidak ingin kejadian itu...*”. Pernyataan Wakapolres sebagaimana tampak pada data 9 dan 10 justru lebih menunjukkan ketegasan melalui penggunaan persona pertama bentuk jamak sebagai representasi lembaga, yakni, kepolisian sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap peristiwa penangkapan 21 warga.

Adapun pernyataan dua tokoh lainnya, yakni warga yang menjadi wakil demonstran yang terdapat pada data 7 dan 8, serta data 11 adalah representasi dari pihak ‘oposisi’, yakni kelompok korban dan pembela korban. Dari segi konstruksi kalimat, pernyataan kelompok korban (wakil dari para istri yang suaminya ditahan) terlihat naratif dan polos. Semua pernyataan berbentuk kalimat aktif transitif dan memiliki referensi yang jelas, juga berformulasi interogatif. Hal itu terlihat, misalnya, pada pernyataan, “*Sampai berapa lama suami dan anak-anak kami harus ‘menanggung tuduhan hukum...*” dan “*Bapak Kapolres yang kami cintai! Sejak suami kami masuk tahanan...*”. Pernyataan koordinator JPIC-SVD sebagaimana tampak pada data 11 merupakan *statements* berisi asumsi yang ditandai dengan penggunaan kata *diduga*, tetapi pernyataan itu disertai dengan argumen saksi, yakni adanya pengakuan dari seorang warga sebagai penjual tanah.

Selain aspek tata bahasa, Fairclough (1989) mengajukan dua pertanyaan berkaitan dengan analisis struktur tekstual, yakni (1) apa saja konvensi interaksional yang digunakan di dalam wacana, dan apakah ada cara di mana satu peserta mengontrol giliran peserta lain?; dan (2) struktur skala besar apa yang dimiliki teks? Pertanyaan pertama terutama berhubungan dengan dialog, juga secara luas berkaitan dengan fitur organisasi tingkat tinggi yang memiliki nilai *relasional*, dan pertanyaan kedua berhubungan dengan dialog dan monolog, sekaligus berkaitan dengan fitur yang memiliki nilai *pengalaman*.

Struktur tekstual terlihat jelas pada pemberitaan media daring *Poskupang.com* ketika terjadi demonstrasi para ibu di depan Polres Manggarai Barat. Dalam berita tersebut terjadi dialog antara seorang ibu dengan Wakapolres. Dialog tersebut dapat dilihat pada data 7, 8, 9, dan 10. Dalam pemberitaan media, keempat data tersebut dikemas secara berurutan, membentuk sebuah narasi dialogis. Hal itu terjadi karena liputan ditujukan secara khusus untuk suatu aksi demonstrasi. Wartawan mengutip jalannya aksi dalam naratif-dialog. Data 7 dan 8 merupakan deretan pernyataan yang disampaikan wakil para demonstran, kemudian ditanggapi Wakapolres melalui pernyataan sebagaimana dilihat pada data 9 dan 10. Dalam sajian tersebut, masing-masing pihak memiliki dua porsi giliran bicara.

Pada data-data tersebut sesungguhnya terkonstruksi suatu wacana dialogis. Wakil demonstran memiliki porsi lebih banyak dalam giliran bicara, yakni dua kali menyampaikan pernyataan dalam bentuk deretan kalimat subordinatif. Karakteristik bahasa, terutama struktur dan diksi yang digunakan informal, tetapi komunikatif. Penggunaan kata ‘bukan’ pada frasa *bukan pembunuh, bukan masa bayaran, bukan teroris, bukan pengacau berbau SARA*, tampak berkorelasi



dengan motif penangkapan 21 warga, yang tidak lain adalah suami-suami mereka. Motif dalam bingkai analisis wacana kritis berada pada tataran interdiskutivitas, yakni kombinasi genre dan wacana, termasuk juga penanda diskursif (Titscher et al., 2000). Kabidhumaspolda dan Kapolres menyatakan bahwa penangkapan dilakukan karena mereka membawa benda tajam, sehingga meresahkan warga sekitar (data 1 sampai 6). Jadi, di mata aparat, kehadiran warga di Golo Mori berpotensi menimbulkan konflik. Padahal, seperti pengakuan para ibu, suami mereka datang sebagai buruh harian. Dua perspektif yang berbeda ini oleh Liu & Guo (2016) disebut sebagai “perspektif diskriminasi sosial”. Maksudnya ialah diskriminasi dapat ditunjukkan melalui pandangan yang berbeda di dalam adu wacana. Perspektif siapa yang benar, lazim dikembalikan pada ikhwal keadilan.

Pernyataan kedua dari wakil demonstiran juga disampaikan dengan santun yang ditujukan kepada Kapolres. Berbagai fitur linguistik dan struktur sintaksis yang ada pada data tersebut memiliki makna ‘*curahan hati*’, yakni meminta dengan hormat kepada pihak kepolisian untuk membebaskan suami-suami mereka dari tahanan mengingat suami mereka adalah tulang punggung keluarga yang sedianya datang ke Golo Mori sebagai buruh harian. Secara ekonomis, ketidakhadiran suami mereka di dalam keluarga berdampak pada banyak hal, terutama biaya hidup rumah tangga, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan anak. Hal ini mengonfirmasi pernyataan Fairclough (1989) yang menyatakan bahwa struktur tekstual dihadirkan dalam suatu konteks tertentu yang berhubungan langsung dengan ‘pengalaman’. Hal itu juga berkaitan dengan kesetaraan atau gender karena tampak bahwa kaum perempuan mengambil peran sebagai subjek (Badara & Jamiludin, 2020).

### **Interpretasi**

Berkaitan dengan aspek hubungan antarteks, berdasarkan data-data yang ada dapat dilihat bahwa pernyataan Kabidhumas Polda NTT di *Kompas.com* edisi 6 September 2021 (data 1 s.d. 4), selalu sejalan dengan pernyataan Kapolres Manggarai Barat (data 5 dan 6) yang dikutip *cnnindonesia.com* (juga dirilis pada 6 September 2021). Titik tekanan kedua teks tersebut adalah tentang “keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menghindari konflik”. Sementara itu, pernyataan Wakapolres justru terlihat bersifat netral, tidak menyinggung ihwal ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’, juga menghindari penggunaan kata ‘konflik’. Tentu sebagai bawahan Kapolres, Wakapolres cukup hati-hati menyampaikan *statements*: “...sudah kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan...” (data 9 dan 10) untuk memberi respons terhadap pernyataan wakil dari para demonstiran. Hal tersebut tampak wajar, mengingat sejak awal peristiwa penangkapan, Wakapolres belum terlibat di dalam pemberitaan. Oleh karena itu, pernyataan Wakapolres, dalam hubungan dengan teks sebelumnya, semata untuk menjawab pernyataan wakil dari para demonstiran, tidak merujuk pada pihak manapun. Wodak (Jahedi et al., 2014) menyebut fenomena itu sebagai strategi referensial, pola membangun wacana dengan menyelamatkan aktor atau agen.

Di sisi lain, pada pernyataan Koordinator JPIC-SVD (data 11), termuat informasi yang justru mengagetkan karena adanya dugaan bahwa kasus penangkapan 21 warga di Golo Mori bermuatan ekonomi dan politis. Koordinator JPIC-SVD menemukan adanya kejanggalan terkait penangkapan dan penahanan itu berdasarkan kesaksian dari seorang warga bahwa sebidang tanah sengketa justru pernah dijual pemiliknya kepada seorang polisi. Media massa daring *Voxnnt.com* menuliskan secara eksplisit pada judul berita dengan sangat unik:



“Terungkap! Kapolres Mabar Diduga Terlibat dalam...”. Kapolres Mabar menampik isu keterlibatan polisi di dalam kasus pembelian tanah sengketa. Penangkapan dan penahanan ke-21 warga itu karena adanya laporan dari seorang warga Golo Mori bahwa sekelompok orang hendak menguasai lahan, dan cukup meresahkan masyarakat desa. Sebagaimana tampak dalam pernyataannya pada data 12, Kapolres Manggarai Barat dengan tegas menyatakan, “*Saya jelaskan bahwa kemarin tidak terjadi bentrok namun yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat adalah mengamankan 21 orang...*”.

Dari sisi hubungan intertekstualitas, *Poskupang.com* dan *cnnindonesia.com* menyoroti soal peristiwa penangkapan 21 warga di desa Golo Mori. Tokoh-tokoh yang dilibatkan di dalam berita adalah Kabidhumas Polda (*Kompas.com*) dan Kaplores (*cnnindonesia.com*). Dengan mencermati isi berita dari kedua media ini dapat dikatakan bahwa terdapat kesamaan topik pemberitaan serta tokoh yang dilibatkan, yakni Kabidhumas Polda dan Kaplores Manggarai Barat. Meskipun berbeda nama dan jabatan, keduanya merupakan aparatur negara, Pimpinan dan Kabid di lingkup Polda NTT dan Polres Manggarai Barat.

Sementara itu, *Poskupang.com* memuat berita terkait dengan aksi demo dari para istri korban yang dimuat pada 29 September 2021, sedangkan *Voxntt.com* melaporkan kasus dugaan keterlibatan kepolisian dalam sengketa tanah Golo Mori yang dirilis pada 26 September 2021. Keterjalinan teks-teks itu terletak pada topik dan objek pemberitaan yang sama meskipun berbeda dari sisi pelibatan tokoh di dalam tiap pemberitaan. Keterlibatan tokoh dengan aneka *statements* sebagaimana diberitakan media daring merupakan konstruksi wacana yang mencerminkan bukan hanya ideologi atau kepentingan tetapi juga pengakuan terhadap eksistensi diri dan lembaga. Dalam arti itu, interpretasi terhadap tiap pernyataan para tokoh jauh dari bias karena merupakan akumulasi dari hasil eksplorasi dan elaborasi yang mendalam terhadap antara fakta sosial dan budaya, bahkan terhadap stratifikasi yang berkorelasi dengan status, institusi, *option*, dan seks atau gender (Mason, 2013; Wall et al., 2015).

### **Eksplanasi**

Pemberitaan tentang sengketa tanah di Golo Mori, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada dasarnya dibingkai dalam konteks situasional, institusional, dan sosial-budaya. Dalam hal aspek situasional, secara geografis patut dikemukakan bahwa Kota Labuan Bajo, ibu kota kabupaten Manggarai Barat, merupakan daerah pariwisata yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai daerah wisata super premium (Kodir et al., 2020). Dari sisi ini terimplisit adanya motif ekonomi. Golo Mori merupakan sebuah desa di ujung timur Pulau Komodo di kota Labuan Bajo, sehingga para pemilik modal tertarik untuk ‘berburu aset’. Pembelian tanah untuk aneka kepentingan yang tentu saja sangat bernilai ekonomi tinggi saat ini dan ke depan. Pernyataan Kapolres pada data 6 membuktikan bahwa demi mencegah konflik, pengamanan dilakukan agar tidak terjadi kasus yang berpotensi memakan korban, “*Karena itu saya tidak ingin kejadian itu (konflik) terulang kembali di daerah wisata ini.*” (*cnnindonesia.com* 6/9/2021).

Sebagaimana diberitakan *Voxntt.com* (4/3/2021), tanah sengketa Golo Mori itu sesungguhnya merupakan tanah ulayat yang berlokasi pada 11 titik di Golo Mori. Adapun tanah ulayat ialah tanah adat atau tanah komunal, artinya tanah seluruh masyarakat yang diwariskan nenek moyang. Sebagaimana dicatat Sundara & Gani (2020), bila tidak dikelola atau ditata dengan baik, tanah ulayat dapat menimbulkan konflik internal yang tentu berdampak pada rusaknya tatanan sosial,



memorakporandakan relasi kekeluargaan, mendatangkan kerugian material, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, tanah ulayat di Golo Mori itu justru telah dijual oleh beberapa warga kepada pihak luar tanpa persetujuan seluruh masyarakat, termasuk para pemangku adat. Hal itulah yang memicu konflik internal hingga terjadi peristiwa penangkapan terhadap 21 warga oleh aparat kepolisian.

Pemberitaan terkait sengketa tanah Golo Mori secara eksplisit melibatkan beberapa institusi, yakni media yang memberitakan peristiwa (*Kompas.com*, *cnnindonesia.com*, *Poskupang.com*, dan *Voxntt.com*), lembaga kepolisian, dan JPIC-SVD. Dari sisi media massa, keempat media sebagaimana disebutkan, memberitakan peristiwa sengketa tanah di Desa Golo Mori secara berbeda, terutama, yang paling tampak ialah tokoh-tokoh yang dilibatkan di dalam berita sebagai narasumber. *Kompas.com* secara eksklusif membuat laporan berita dengan narasumber tunggal Kabidhumas Polda NTT. Dalam laporan berita itu, sama sekali tidak ditemukan narasumber lain. Media daring *cnnindonesia.com* secara dominan memanfaatkan Kapolres Manggarai Barat sebagai narasumber. Media ini juga tidak melibatkan narasumber lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya media sendiri merupakan suatu agen yang memiliki otoritas sekaligus kekuatan di dalam memberitakan suatu peristiwa. Artinya, media massa dapat memutuskan mana yang harus menjadi hal utama yang diberitakan atau dapat berpihak kepada siapa di dalam pemberitaannya (Annas & Fitriawan, 2018; Mukhlis et al., 2020; Rahzanie & Rustono, 2019).

Berbeda dengan dua media nasional itu, dua media massa regional, *Poskupang.com* dan *Voxntt.com* justru melibatkan tokoh atau narasumber lain. Dalam liputan *Poskupang.com* terkait peristiwa demonstrasi, liputan justru variatif dari segi tokoh yang dilibatkan. Hal yang mengagetkan justru pada reportase *Voxntt.com* ketika melaporkan dugaan keterlibatan lembaga kepolisian di dalam kasus ini. Pernyataan Koordinator JPIC-SVD melalui diksi ‘dugaan’ (data 12) mengimplisitkan adanya konspirasi kasus mafia tanah di Golo Mori, Labuan Bajo. Dalam kaitan dengan ini, JPIC-SVD juga dapat diidentifikasi sebagai salah satu lembaga dalam posisi sebagai lembaga advokasi terhadap para korban penangkapan. Narasi atau dialog pada aksi demonstrasi yang terbaca pada data 7 s.d. data 10, sesungguhnya dilandasi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebagai sebuah aksi yang mendapat perlindungan hukum, isi dialog terlihat netral. Struktur makro wacana itu dapat dipetakan menjadi permohonan dari wakil demonstran dan tanggapan dari Wakapolres. Wakapolres adalah representasi dari lembaga kepolisian karena sejak awal keterlibatan polisi sudah mendominasi hampir seluruh pemberitaan dari keempat media.

Hal terakhir dari ulasan ini ialah aspek sosial dan kultural yang mbingkai peristiwa. Dalam budaya Manggarai, pembagian tanah memiliki aturan main tersendiri. Secara struktural, pembagian tanah di dalam *Gendang* (rumah adat, termasuk struktur di dalamnya) merupakan mandat dari *Tua Teno* sebagai pemangku adat dengan tugas khusus menangani pembagian tanah kepada masyarakat dalam suatu musyawarah untuk mufakat (Israwati, 2018). Sistem pembagian tanah macam ini, sesungguhnya merupakan warisan leluhur orang Manggarai. Dalam hal penyelesaian sengketa tanah, maka perlu dilibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam *Gendang*, yakni melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat seperti ini termasuk salah satu nilai luhur budaya Manggarai yang disebut *Lonto Leok*, yaitu budaya kolektif untuk hidup



rukun dan harmonis. Termasuk dalam menyelesaikan segala persoalan di dalam hidup bersama (Effendi et al., 2020; Tapung et al., 2018).

Dalam kasus sengketa tanah Golo Mori, permasalahan muncul karena terdapat warga yang mengklaim beberapa titik dari tanah ulayat. Bahkan menjualnya kepada pihak luar. Mereka yang ditangkap dan diamankan aparat bukan hanya berasal dari Desa Golo Mori, tetapi bahkan dari luar Kabupaten Manggarai Barat. Sesungguhnya, mereka adalah pekerja harian atau buruh yang konon disewa oleh seseorang untuk menggarap lahan yang sesungguhnya telah dijual oleh warga lainnya. Jadi, dalam kasus ini muncul tiga perspektif: 1) perspektif kepolisian, mereka ditangkap karena meresahkan warga dengan membawa benda tajam; 2) versi korban (para ibu, istri dari para korban) mereka datang untuk bekerja mencari nafkah sebagai buruh harian; dan 3) versi JPIC-SVD, ada dugaan konspirasi atau mafia jual beli tanah di desa itu.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, pada analisis deskripsi ditemukan adanya kosakata yang selalu diulang dan berlebihan, terdapat fitur linguistik yang berkorelasi makna secara antonimi sekaligus konotasi negatif. Dalam hal referensi, pernyataan para tokoh menggunakan kata pronomina tertentu yang tidak sekadar merujuk pada individu, tetapi juga mewakili kelompok atau lembaga. Pada tataran gramatika ditemukan adanya formulasi kalimat pasif untuk menyembunyikan subjek pelaku, dan penggunaan kalimat negatif sebagai ‘bentuk ingkar’ atau negasi. *Kedua*, pada tahap interpretasi terdapat hubungan antarteks yang saling mendukung di dalam pernyataan para tokoh, netral, dan bertentangan. Dari sisi posisi media, masing-masing media memiliki keunikan di dalam pemberitaan. Dua media daring nasional lebih menyoroti pihak kepolisian sebagai narasumber, sedangkan dua media regional di dalam pemberitaan melibatkan wakil korban dan advokat. *Ketiga*, bagian eksplanasi menunjukkan bahwa sistem pembagian tanah di Manggarai, Flores, NTT, merupakan warisan leluhur yang patut dipertimbangkan sebagai norma budaya di dalam penyelesaian konflik. Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, baik menggunakan *frame* teori lain maupun menggunakan sumber data yang berbeda. Kajian tentang topik ini akan saling memperkaya dan berkontribusi lebih banyak, baik untuk keilmuan wacana kritis maupun bagi pembaca.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Unika Santu Paulus Ruteng, Flores, NTT, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat, dan Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa S-3, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang yang telah memfasilitasi penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. H. (2021). Politicizing Covid-19 vaccines in the press: A critical discourse analysis. *International Journal for the Semiotics of Law*, 35(1), 1167–1185. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11196-021-09857-3>
- Al Chazim, A. K., Mulyaningsih, I., & Uswati, T. S. (2019). Analisis Wacana Kritis Berita Politik Fajar Cirebon Edisi November 2018–Januari 2019 (Critical Discourse Analysis of Political News of Fajar Cirebon Edition



- November 2018â€” January 2019). *Jalabahasa*, 15(2), 130–146. <https://doi.org/10.36567/jalabahasa.v15i2.340>
- Annas, A., & Fitriawan, R. A. (2018). Media dan Kekerasan: Analisis Norman Fairclough Terhadap Pemberitaan Tarung Gladiator. *Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 37–54. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i1.5224>
- Assidik, G. K., & Santoso, B. W. J. (2016). Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika: Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 201–215. <https://doi.org/10.15294/seloka.v5i2.13084>
- Badara, A., & Jamiludin. (2020). Representation of Indonesian women workers: A critical discourse analysis on the newspapers of nationalist-secular and Islamic ideological perspectives. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 79–101. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.79-101>
- Effendi, Y. R., Bafadal, I., Sudana, I. N. D., & Arifin, I. (2020). The principal transformational leadership strategy in developing national policies for strengthening character education in eastern Indonesia. *Italian Journal of Sociology of Education*, 12(2), 51–78. <https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2020-2-3>
- Ellyawati, H. C. (2016). Analisis Wacana Kritis Teks Berita Kasus Terbongkarnya Perlakuan Istimewa terhadap Terpidana Suap Arthalyta Suryani pada Media Online. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 19–35. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.267>
- Fairclough, N. (1989). *Language and Power* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The Critical Study of Language*. New York: Logman Inc.
- Fauzan, U. (2016). *Analisis Wacana Kritis: Menguak Ideologi dalam Wacana* (1st ed.). Yogyakarta: Idea Press.
- Graham, L. J. (2012). The Product of Text and “Other” Statements: Discourse Analysis and the Critical use of Foucault. *The Power In/Of Language*, 112–123. <https://doi.org/10.1002/9781118343142.ch8>
- Hura, D. N., Manaf, N. A., & Ramadhan, S. (2020). Pemosisian Pelaku dan Korban dalam Berita Kriminal Tentang Pembunuhan di Berita Online Tribun News.Com. *Aksara*, 32(1), 95–108. <https://doi.org/10.29255/aksara.v32i1.522.95-108>
- Indah, N., & Mardikatoro, H. B. (2017). Analisis Tekstual dalam Konstruksi Wacana Berita Korupsi di Metro TV dan NET dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(2), 123–129.
- Israwati, I. (2018). Peran Tu’a Golo dalam Pembagian Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Desa Macan Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat NTT. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengabdian Pendidikan Sejarah*, 3(2), 36–41. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1381>
- Jahedi, M., Abdullah, F. S., & Mukundan, J. (2014). An Overview of Focal Approaches of Critical Discourse Analysis. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 2(4), 195–196. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.2n.4p.28>
- Kartikasari, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Terhadap



- Pemberitaan Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi. *Jurnal An-Nida*, 12(2), 114–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/an.v12i2.1608>
- Khan, M. H., Adnan, H. M., Kaur, S., Khuhro, R. A., Asghar, R., & Jabeen, S. (2019). Muslims' representation in Donald Trump's anti-muslim-islam statement: A critical discourse analysis. *Religions*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.3390/rel10020115>
- Kodir, A., Tanjung, A., Astina, I. K., Nurwan, M. A., Nusantara, A. G., & Ahmad, R. (2020). The dynamics of access on tourism development in Labuan Bajo, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 29(2), 662–671. <https://doi.org/10.30892/gtg.29222-497>
- Lailiyah, N., Kurwidaria, F., Indri W, F., & Sumarlam, S. (2021). Analisis Wacana Kritis Monolog Dalam Talk Show Mata Najwa Edisi “Menanti Terawan.” *Efektor*, 8(1), 34–44. <https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15481>
- Liu, K., & Guo, F. (2016). A Review on Critical Discourse Analysis. *Theory and Practice in Language Studies*, 6(5), 1076–1084. <https://doi.org/10.17507/tpls.0605.23>
- Maricar, F. (2018). Wacana dan Media: Antara Kekuasaan, Representasi Ideologi, dan Realita Sosial. *Tekstual*, 16(4), 1–10. <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/tekstual/article/view/1058>
- Mason, K. (2013). Social stratification and the body: Gender, race, and class. *Sociology Compass*, 7(8), 686–698. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/soc4.12058>
- Mayasari, M., Darmayanti, N., & Riyanto, S. (2013). Critical Discourse Analysis of Reporting on “Saweran for KPK Building” in Media Indonesia Daily Newspaper. *International Journal of Linguistics*, 5(4), 213–224. <https://doi.org/10.5296/ijl.v5i4.4198>
- Mohammadi, M., & Javadi, J. (2017). A Critical Discourse Analysis of Donald Trump's Language Use in US Presidential Campaign, 2016. *International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, 6(5), 1–10. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.6n.5p.1>
- Montejo, G. M., & Adriano, T. Q. (2018). A critical discourse analysis of headlines in online news portals. *Journal of Advances in Humanities and Social Sciences*, 4(2), 70–83. <https://doi.org/10.20474/jahss-4.2.2>
- Mukhlis, M., Masjid, A. Al, Widyaningrum, H. K., Komariah, K., & Sumarlam, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Surat Kabar Online dengan Tajuk Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Pandemi Covid-19. *Geram*, 8(2), 73–85. [https://doi.org/10.25299/geram.2020.vol8\(2\).5867](https://doi.org/10.25299/geram.2020.vol8(2).5867)
- Mulae, S. O., & Mahdi, S. (2014). Analisis Ketransitifan dalam “Roots of the North Maluku Conflict” di Jakarta Post (1999): Analisis Wacana Kritis. *Sosiohumaniora*, 16(1), 77–83. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v16i1.5687>
- Mustika, P. M., & Mardikantoro, H. B. (2018). Textual Analysis of Corruption News Text on Trans TV and Global TV Media: Critical Discourse Analysis by Norman Fairclough. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 173–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/seloka.v7i2.19004>
- Pratiwi, A. (2018). Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News, Model Robert N.



- Entman). *Thaqāfiyyāt*, 19(1), 1–22.
- Rahzanie, R. D., & Rustono, R. (2019). The representation of media power in editorial languages on Pikiran Rakyat daily newspaper. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(2), 39–47. <https://doi.org/10.15294/seloka.v8i2.32840>
- Santoso, B. W. J. (2018). Reprsentasi Aktor Sosial Politik dan Pertarungan Makna dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tingkat Provinsi di Pulau Jawa pada Tahun 2018 di Media Massa Daring dalam Perspektif Norman Fairclough. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 16*, 489–494.
- Shah, S. K., & Mubarak, A. (2018). Media discourse as representative of sociocultural milieu of law and order in Pakistan: A critical discourse analysis of newspapers' headlines about Model Town tragedy, Lahore. *Pakistan Journal of Language Studies*, 2(2), 1–13.
- Smith-Khan, L. (2019). Why refugee visa credibility assessments lack credibility: a critical discourse analysis. *Griffith Law Review*, 28(4), 406–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10383441.2019.1748804>
- Sudaryanto. (2016). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik (II)*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sundara, K., & Gani, A. (2020). Peran Tu'a Ulayat Warloka dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 16–22. <https://doi.org/10.31764/civicus.v8i1.1790>
- Susylowati, E. (2019). Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita Senandung Pulu 'Kartini Kendeng' Menolak Pabrik Semen dalam Media Online Kompas. *LOA: Jurnal Ketatabahasaan dan Kesusastraan*, 14(2), 95–104. <https://doi.org/10.26499/loa.v14i2.1725>
- Tapung, M., Maryani, E., Lon, Y. S., Payong, M. R., & Supriatna, N. (2018). Developing the Value of “Lonto Leok” in Manggarai Culture to Empower the Skills of Social Problem-Solving in Social-Sciences Learning of Junior-High School. In A. Abdulhah (Ed.), *Ancosh: Annual Conference on Social Sciences and Humanities*, 316–320. <https://doi.org/10.5220/0007419703160320>
- Titscher, S., Mayer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2000). *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: Sage Publications.
- Van Dijk, T. A. (2008). Critical discourse analysis and nominalization: Problem or pseudo-problem? *Discourse and Society*, 19(6), 821–828. <https://doi.org/10.1177/0957926508095897>
- Wall, J. D., Stahl, B. C., & Salam, A. F. (2015). Critical discourse analysis as a review methodology: An empirical example. *Communications of the Association for Information Systems*, 37, 257–285. <https://doi.org/10.17705/1cais.03711>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory, and Methodology. In R. Wodak, & M. Meyer (Eds.). *Methods for Critical Discourse Analysis*, (pp. 1, 33). London: Sage.
- Zhang, M. (2014). A Critical Discourse Analysis of Political News Reports. *Theory and Practice in Language Studies*, 4(11), 2273–2277. <https://doi.org/10.4304/tpls.4.11.2273-2277>